

Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

2016



**DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2016**

ISSN : 2442.6261

Nomor Publikasi : 21520.1706

Katalog : 3205008.21

Ukuran Buku: 16 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii+64 Halaman

Naskah: Bidang Statistik Sosial

Penyunting: Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit: Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Dicetak Oleh:

CV. Berkah Mandiri

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,
mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau
seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik**

Tim Penyusun

Penanggungjawab Umum: Panusunan Siregar

Penanggungjawab Tehnis: Satriana Yasmuarto

Koordinator: Dian Kartika Sari

Anggota: Dian Kartika Sari

Edy Purnomo

KATA PENGANTAR

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan informatif. Dengan tersedianya data dan informasi kemiskinan, diharapkan dapat mendeteksi faktor-faktor yang terkait dengan masalah kemiskinan itu sendiri.

Publikasi ini menjelaskan metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS dan analisis tentang penduduk/rumah tangga miskin. Analisis yang dilakukan meliputi perkembangan tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau, Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pengeluaran serta profil rumah tangga miskin. Data profil rumah tangga miskin yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016.

Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengguna data dan semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada mereka yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian buku ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Tanjungpinang, Agustus 2017
Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulauan Riau
Kepala,



Panusunan Siregar M.Sc.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB 1 Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 Metodologi	9
2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan	9
2.2. Indikator Kemiskinan.....	15
2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan.....	17
BAB 3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan	25
3.1. Garis Kemiskinan Kepulauan Riau	25
3.2. Penduduk Miskin Kepulauan Riau.....	28
3.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan ..	29
3.4. Gini Rasio.....	34
3.5. Distribusi Pengeluaran Kriteria Bank Dunia.....	37

Daftar Isi

BAB 4 Profil Rumah Tangga Miskin	41
4.1. Karakteristik Sosial Demografi	43
4.2. Karakteristik Tempat Tinggal	46
4.2.1. Jenis atap	46
4.2.2. Jenis dinding	47
4.2.3. Jenis penerangan	48
4.2.4. Sumber air minum	49
4.2.5. Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar	51
4.2.6. Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal	52
4.2.7. Luas Lantai	53
4.2.8. Jenis Lantai	54
4.3. Karakteristik Sosial Ketenagakerjaan	55
4.4. Karakteristik Sosial Pendidikan	61

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 3.1. Garis Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Daerah, Maret 2016-September 2016.....	27
Tabel 3.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau Maret 2016–September 2016.....	34
Tabel 3.3. Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia Berdasarkan Tipe Daerah, Kepulauan Riau, Maret 2016.....	38
Tabel 4.1. Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016.....	43
Tabel 4.2. Persentase Rumah Tangga Miskin Kepulauan Riau menurut Luas Lantai, Maret 2016	54
Tabel 4.3. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga dan tipe daerah , Maret 2016.....	59
Tabel 4.4. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga dan Tipe Daerah, Maret 2016.....	62
Tabel 4.5. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga dan Tipe Daerah, Maret 2016.....	63

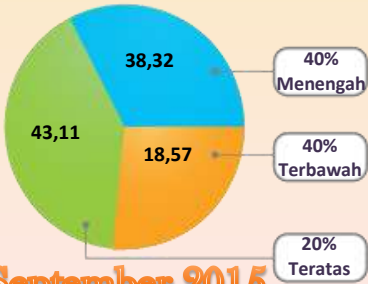
<https://kepri.bps.go.id>

Daftar Gambar

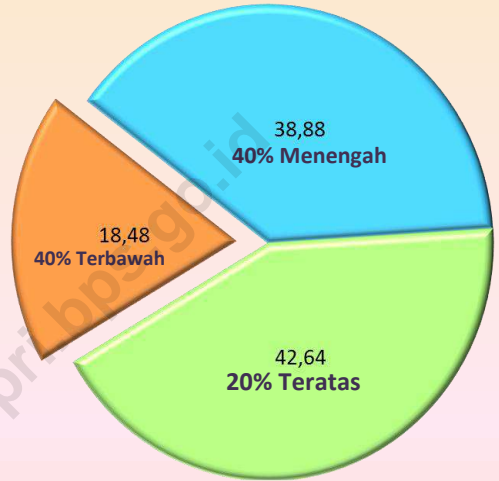
	Halaman
Gambar 2.1. Koefisien Gini menurut Kurva Lorenz	18
Gambar 3.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kepulauan Riau, 2013-2016.....	26
Gambar 3.2. Penduduk Miskin dan Persentasenya di Kepulauan Riau, Maret 2013 – September 2016 (RP).....	29
Gambar 3.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kepulauan Riau Maret 2013 – September 2016.....	32
Gambar 3.4. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂) di Kepulauan Riau, Maret 2013–September 2016.....	33
Gambar 3.5. Perkembangan Gini Ratio Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2011-September 2016.....	35
Gambar 3.6. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau, Menurut Tipe Daerah Maret 2013 – September 2016.....	36
Gambar 4.1. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Atap Terluas, Maret 2016.....	47
Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Dinding Terluas, Maret 2016	47
Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Miskin Kepulauan Riau menurut Sumber Penerangan, Maret 2016.....	49
Gambar 4.4. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Sumber Air Minum yang Digunakan, Maret 2016.....	50
Gambar 4.5. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, Maret 2016.....	51
Gambar 4.6. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Maret 2016.....	52
Gambar 4.7. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Lantai, Maret 2016.....	55
Gambar 4.8. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, Maret 2016.....	52
Gambar 4.9. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Lapangan Usaha dalam Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2016.....	58
Gambar 4.10. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Status /Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2016.....	52

**DISTRIBUSI PENGELUARAN PENDUDUK
KRITERIA BANK DUNIA,
SEPTEMBER 2015-SEPTEMBER 2016, KEPULAUAN RIAU**

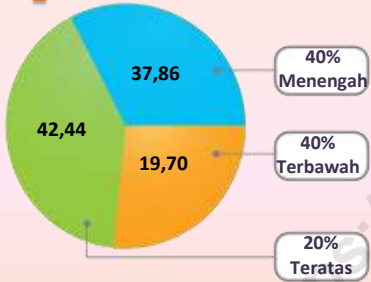
Maret 2016



September 2016



September 2015



Kategori Ketimpangan versi Bank Dunia



“ Ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada pada kategori rendah ”

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pendahuluan

(Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret. Sejak tahun 2015 sampai saat ini BPS melaksanakan Susenas per semester, sehingga data kemiskinan yang dihasilkan sebanyak dua kali di setiap tahunnya. Pada buku ini hanya menyajikan dan membahas kemiskinan pada level provinsi saja.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan Buku Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 dan perkembangannya;
- b. Mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016;
- c. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan ini mencakup tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menurut kabupaten/kota tahun 2016. Karakteristik rumah tangga miskin, distribusi, dan ketimpangan pendapatan penduduk serta beberapa indikator kemiskinan lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab 1, menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan buku data dan informasi kemiskinan.

Bab 2, menjelaskan tentang konsep kemiskinan yang digunakan, metode penghitungan garis kemiskinan, profil kemiskinan, ukuran kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan, dan ukuran distribusi dan ketimpangan pendapatan.

Bab 3, membahas tentang perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan distribusi pendapatan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kepulauan Riau.

Bab 4, membahas tentang profil rumah tangga miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 berkaitan

Pendahuluan

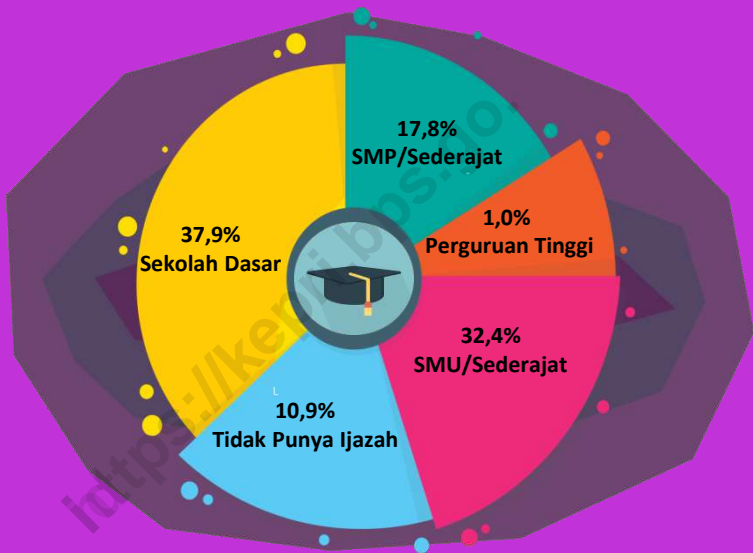
dengan karakteristik pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan.

Bab 5, menggarisbawahi hal-hal penting yang diharapkan mampu memberikan gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator kemiskinan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

<https://kepri.bps.go.id>



Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga, Maret 2016



“

Pendidikan yang berkualitas memberi kita kemampuan untuk berperang melawan kebodohan dan kemiskinan. - Charles B.

Rangel

”

BAB 2

Metodologi

2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

a. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Konsumsi/Pengeluaran dan Kor.

c. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sehingga: $GK = GKM + GKNM$.

Metodologi

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara

yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

di mana:

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = provinsi ke-p.

Metodologi

Selanjutnya, GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

di mana:

K_{jkp} = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p .

HK_{jp} = harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p .

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2.100$$

di mana:

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j , yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

j = Daerah (perkotaan/perdesan)

p = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio

pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

di mana:

$GKNM_{jp}$ = pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

k = jenis komoditi non-makanan terpilih.

J = daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Metodologi

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k}$$

di mana:

$\%PM_k$ = % Penduduk miskin di kabupaten/kota k.

PM_k = Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota k.

P_k = Jumlah penduduk di kabupaten/kota k.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau:

$$PM_p = \sum_{k=1}^n PM_k$$

di mana:

PM_p = Penduduk miskin provinsi.

PM_k = Penduduk miskin kabupaten/kota k.

n = Jumlah kabupaten/kota.

Persentase penduduk miskin provinsi adalah:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

di mana :

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin provinsi.

PM_p = Jumlah penduduk miskin provinsi.

P_p = Jumlah penduduk provinsi.

2.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* ($HCI = P_0$), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk

Metodologi

miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

di mana:

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0),

jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1),

jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2).

2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini, akan digunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan Ukuran Bank Dunia.

a. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i * (Fc_i + Fc_{i-1})$$

di mana:

GR = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

fp_i = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- i

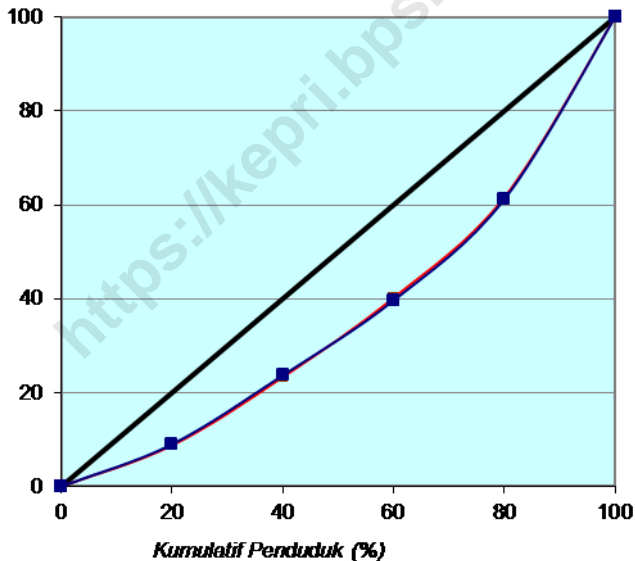
Metodologi

F_{ci} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i

$F_{c_{i-1}}$ = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- $(i-1)$

Gambar 2.1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz

Kumulatif Pengeluaran (%)



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan)

dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun, pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan, kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.

Metodologi

- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya sebagai berikut.

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut.

- Dapat didekomposisi
Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok, yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).
- Dapat diuji secara statistik
Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan

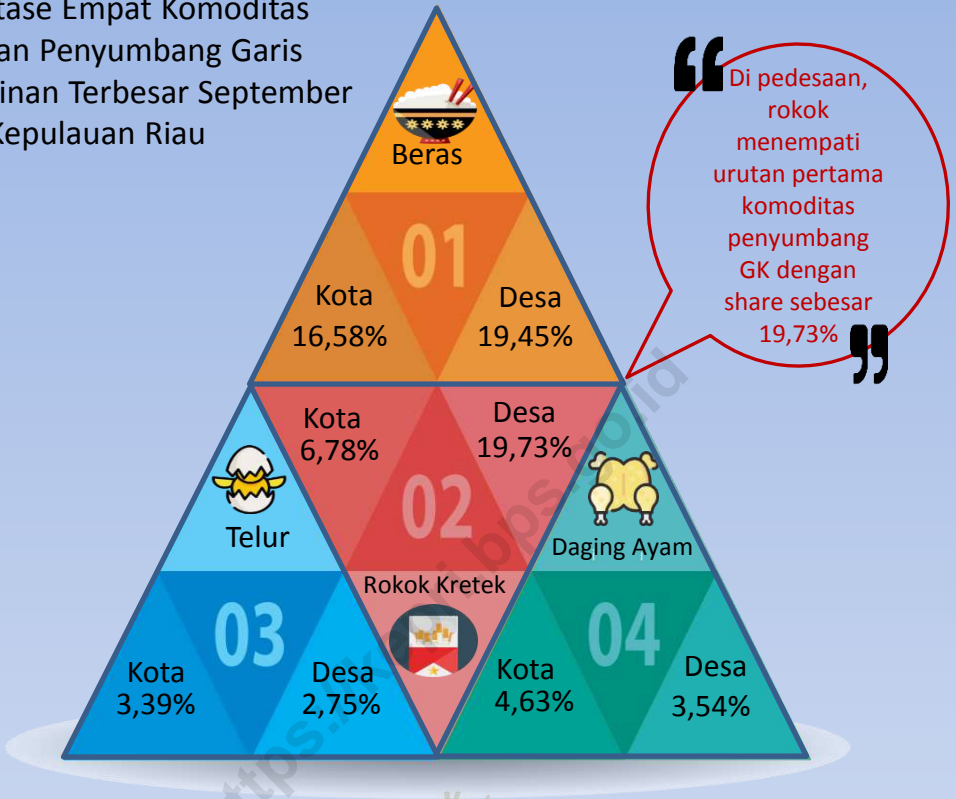
Metodologi

pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

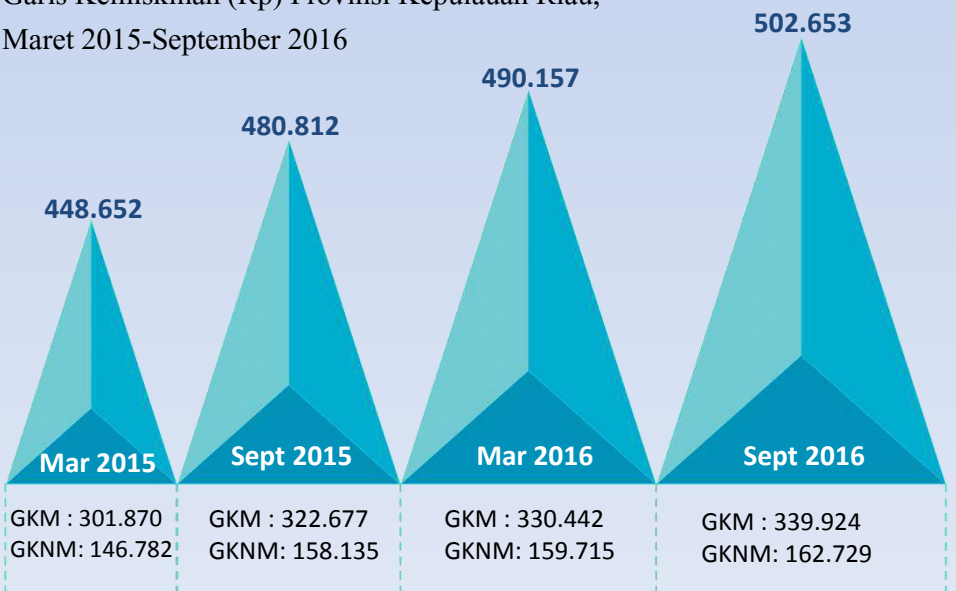
Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut.

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Persentase Empat Komoditas Makanan Penyumbang Garis Kemiskinan Terbesar September 2016, Kepulauan Riau



Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2015-September 2016



BAB 3

Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran

3.1. Garis Kemiskinan Kepulauan Riau

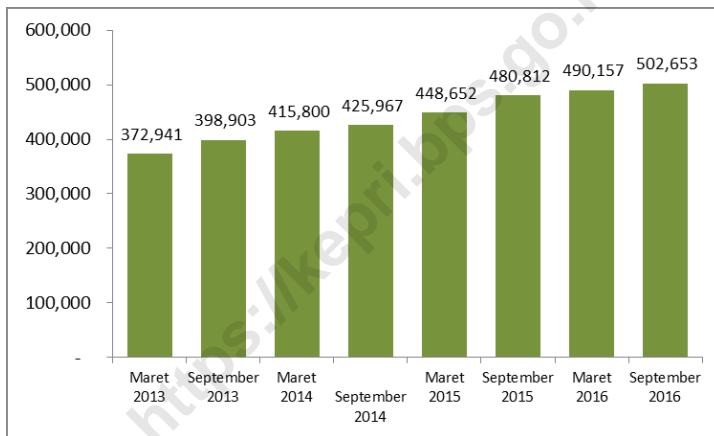
Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Dalam terminologi umum, hal tersebut didefinisikan sebagai kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Dari hasil pendataan Susenas 2016 pada bulan Maret dan September 2016 di Provinsi Kepulauan Riau, maka didapatkan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau adalah Rp. 490.157,- perkapita per bulan untuk Maret 2016 dan naik sebesar RP. 12.496,- menjadi Rp.502.653,- per

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

kapita per bulan pada bulan September 2016. Garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh inflasi, oleh sebab itu nilainya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 3.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kepulauan Riau, Maret 2013 – September 2016 (Rp)



Sumber: Susenas 2013-2016

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Secara umum garis kemiskinan makanan memberikan kontribusi sebesar 67,41 persen terhadap garis kemiskinan total di bulan Maret 2016. Demikian pula halnya pada bulan

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

September 2016, peranan GKM terhadap GK adalah sebesar 67,63 persen. Namun jika dibandingkan antara perdesaan dan perkotaan, peranan GKM terhadap GK menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Di perdesaan GKM memiliki peranan sebesar 75,62 persen pada Maret 2016 dan 76,07 persen di September 2016, sedangkan di perkotaan peranan GKM terhadap GK berada pada angka 65,94 persen di Maret 2016 dan 66,13 persen pada bulan September 2016.

Tabel 3.1. Garis Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Daerah, Maret 2016-September 2016

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2016	326 014	168 404	494 418
September 2016	334 582	171 398	505 980
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2016	353 153	113 836	466 989
September 2016	366 411	115 276	481 687
<u>Kota+Desa</u>			
Maret 2016	330 442	159 715	490 157
September 2016	339 924	162 729	502 653

Sumber: Susenas 2016

3.2 Penduduk Miskin Kepulauan Riau

Mengacu pada definisi Garis Kemiskinan pada sub bab sebelumnya, maka penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

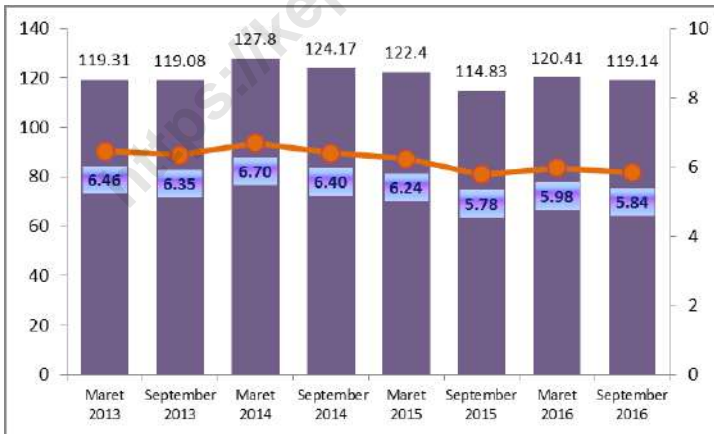
Berdasarkan hasil Susenas Maret 2016, dengan garis kemiskinan sebesar Rp 490.157,- per kapita per bulan, maka diperoleh jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada periode tersebut sebanyak 120.412 orang, atau sebesar 5,98 persen. Gambar 3.2 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau cenderung mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Meskipun di bulan Maret 2016 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,20 poin atau bertambah sebesar 5.578 orang jika dibandingkan dengan bulan September 2015. Namun demikian angka tersebut kembali turun di bulan September 2016.

Peningkatan maupun penurunan angka kemiskinan sangat bergantung pada program-program pengentasan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penduduk miskin adalah penduduk yang sangat rentan dengan perubahan yang terjadi

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

di sekitarnya, terutama dengan perubahan harga pada bahan makanan. Oleh karena itu, bantuan pemerintah berupa bahan makanan pokok mampu menekan angka kemiskinan, namun dengan bantuan untuk kesehatan dan pendidikan diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan. Dalam jangka panjang, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan dapat hidup mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Gambar 3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kepulauan Riau, Maret 2013–September 2016



Sumber: Susenas 2013-2016

3.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan tentu tidak hanya berfokus pada berapa jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Lebih daripada itu, penanggulangan kemiskinan harus meliputi beberapa aspek, seperti seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dari Garis Kemiskinan serta distribusi pengeluaran antara penduduk miskin.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada tiga ukuran kemiskinan yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di suatu daerah. Ukuran tersebut adalah *poverty incidence* (P_0) merupakan ukuran yang menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat. Angka ini memiliki kelemahan karena tidak menggambarkan seberapa parah kemiskinan yang terjadi di suatu daerah. *Poverty Gap* (P_1), mengukur seberapa jauh jurang/Gap pendapatan si miskin dari Garis Kemiskinan, akan tetapi tidak menggambarkan jumlah penduduk miskin serta tidak terdeteksi distribusi antar penduduk miskin yang timpang. Ukuran terakhir adalah *poverty severity* (P_2), mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Kelemahan dari P_2 adalah tidak menggambarkan jumlah penduduk miskin.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Dalam analisis kemiskinan dan pengambilan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan, ketiga ukuran kemiskinan ini harus disertakan. Dengan mempertimbangkan ketiga ukuran tersebut, diharapkan kebijakan yang akan diambil dapat menyentuh seluruh aspek sehingga penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

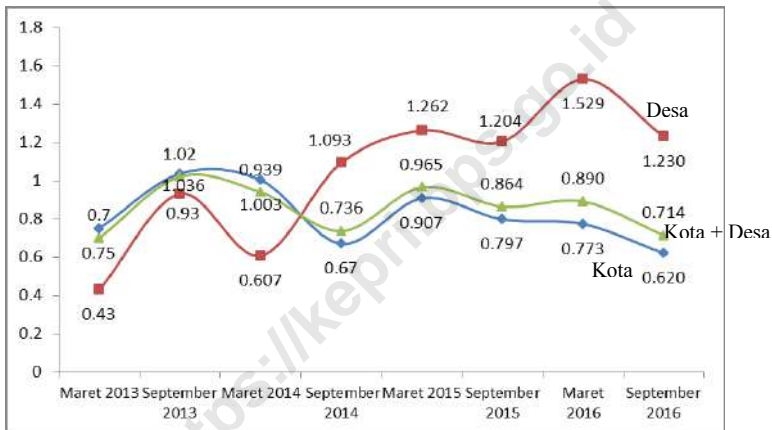
Seperti halnya jumlah persentase penduduk miskin yang menunjukkan trend fluktuatif, nilai P_1 dan P_2 juga menunjukkan pola yang hampir sama. Gambar 3.3 menunjukkan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) 2013-2016. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, demikian pula halnya dengan kenaikan nilai indeks, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.

Apabila dilihat dari *trend* nya, nilai P_1 untuk daerah perkotaan menunjukkan penurunan. Berbeda dengan daerah perdesaan yang terlihat naik dengan nilai P_1 lebih dari 1. Artinya, penduduk miskin di perdesaan semakin jauh dari garis kemiskinan. Dengan kata lain nilai P_1 yang cukup tinggi (lebih dari 1) di perdesaan menunjukkan bahwa

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

kehidupan ekonomi penduduk miskin di perdesaan sangat terpuruk.

Gambar 3.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Kepulauan Riau, Maret 2013–September 2016



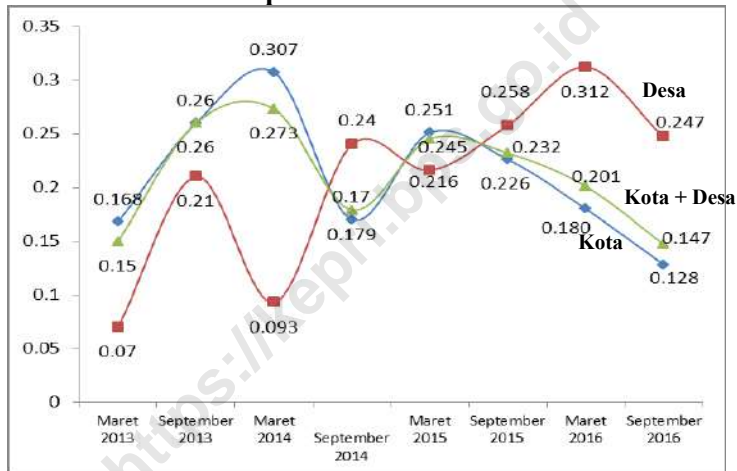
Sumber: Susenas Maret 2013 –September 2016

Nilai P_2 memberikan informasi tentang seberapa timpang pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dari Gambar 3.4, maka dapat dilihat bahwa nilai P_2 di perdesaan jauh lebih tinggi dari perkotaan, dan menunjukkan *trend* meningkat. Berbeda dengan nilai indeks P_2 daerah perkotaan yang terlihat menurun setiap tahunnya. Artinya

ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin lebih tinggi di perdesaan di bandingkan dengan perkotaan.

Gambar 3.4 Perkembangan Indeks Keperahan Kemiskinan (P_2) di Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2013–September 2016



Sumber: Susenas Maret 2013 –September 2016

Dari uraian di atas mengenai perkembangan nilai P_0 , P_1 dan P_2 , maka dapat dilihat bahwa pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan membutuhkan biaya, waktu dan perhatian yang lebih besar jika dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan. Usaha pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan hendaknya dibarengi dengan pembangunan baik pembangunan fisik maupun manusianya. Dengan kondisi geografis di Provinsi Kepulauan Riau yang

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

cenderung sulit dalam masalah transportasi, akses menjadi masalah utama dalam hal pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan.

Tabel 3.2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau Maret 2016–September 2016

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</i>			
Maret 2016	0,773	1,529	0,890
September 2016	0,620	1,230	0,714
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</i>			
Maret 2016	0,180	0,312	0,201
September 2016	0,128	0,247	0,147

Sumber: Susenas 2016

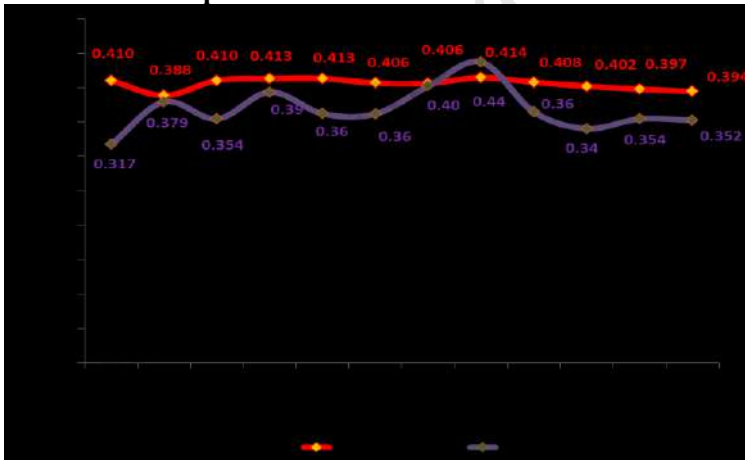
3.4 Gini Rasio

Untuk melihat distribusi pengeluaran penduduk sekaligus melihat bagaimana pemerataannya, salah satu ukuran atau indikator yang dapat digunakan adalah Gini Rasio. Dengan dihasilkannya angka Gini Rasio, akan terdeteksi bagaimana tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah. Nilai Gini Rasio selalu bekisar antara 0 dan 1. Jika nilai Gini Rasio di bawah 0,3, dapat

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah tersebut rendah. Pada interval 0,3-0,5 dalam skala nilai Gini Rasio, ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah adalah sedang, sedangkan dikatakan ketimpangannya tinggi jika nilainya di atas 0,5.

Gambar.3.4 Perkembangan Gini Ratio Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2011-September 2016



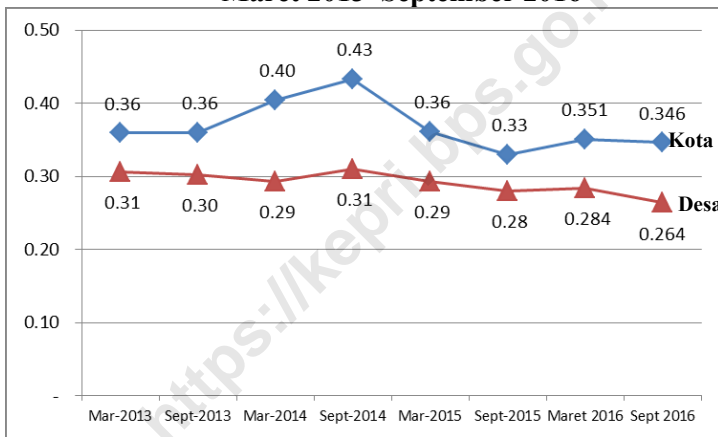
Sumber: Susenas 2011-2016

Pada September 2016, nilai Gini Rasio Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,352, lebih rendah 0,02 poin dibandingkan Maret 2016. Artinya ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau berada pada kategori sedang. Nilai tersebut mendekati ambang batas ketimpangan rendah

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

(mendekati 0,3). Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Indonesia, maka gini ratio Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah. Gini Ratio Indonesia berada pada angka 0,394 di September 2016 dan masuk pada kategori sedang.

Gambar 3.5. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau, Menurut Tipe Daerah Maret 2013–September 2016



Sumber: Susenas Maret 2013 –September 2016

Apabila dibandingkan berdasarkan tipe daerah, perkotaan dan perdesaan, dapat dilihat bahwa Gini Ratio di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di daerah perkotaan lebih tinggi, dengan kata lain distribusi pengeluaran penduduk di perkotaan lebih tidak merata dibandingkan pedesaan.

3.5 Distribusi Pengeluaran Kriteria Bank Dunia

Indikator lain untuk melihat distribusi pendapatan antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 20 persen penduduk berpendapatan tinggi, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Kelompok pertama adalah bagian dari penduduk terkaya dan kelompok ketiga adalah bagian penduduk termiskin. Sedangkan kelompok kedua sering dikatakan sebagai masyarakat kelas menengah.

Berdasarkan pada Tabel 3.3, terlihat bahwa secara umum, distribusi pendapatan di daerah Kepulauan Riau pada kondisi Maret 2016 dan September 2016 berada pada kategori ketimpangan rendah, karena kelompok penduduk berpenghasilan rendah menerima 18,57 persen (Maret 2016) dan 18,48 persen (September 2016) pendapatan nasional. Demikian pula halnya bila dilihat berdasarkan tipe daerah, maka baik daerah perdesaan maupun perkotaan berada pada kategori *low inequality*.

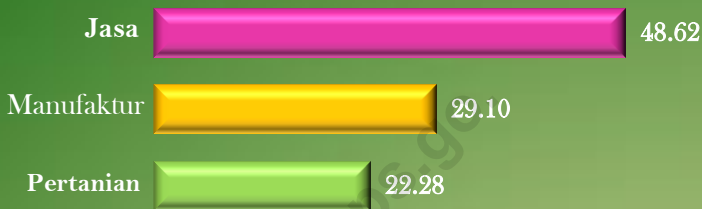
Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Tabel 3.3. Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia Berdasarkan Tipe Daerah, Kepulauan Riau, 2016

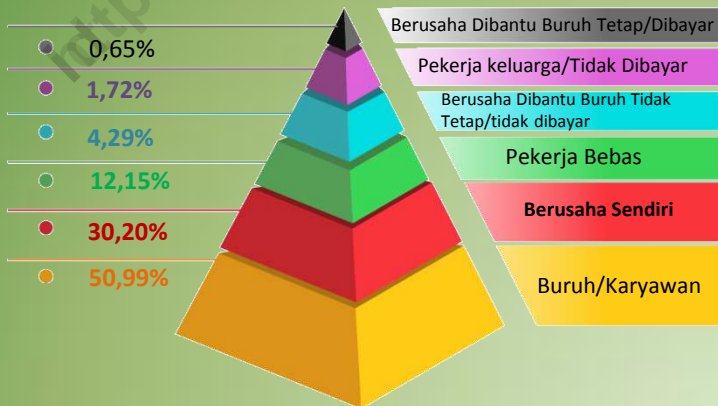
Daerah/Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2016	18,61	38,87	42,53
September 2016	18,62	39,37	42,01
<u>Pedesaan</u>			
Maret 2016	22,78	39,23	37,99
September 2016	23,50	40,60	35,90
<u>Perkotaan+Pedesaan</u>			
Maret 2016	18,57	38,32	43,11
September 2016	18,48	38,88	42,64

Sumber: Susenas 2016

Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2016



Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status/Kedudukan dalam Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2016



BAB IV

Profil Rumah Tangga Miskin

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

- Disamping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.
- Profil kemiskinan diharapkan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terbebas dari kemiskinan dari waktu ke waktu. Permasalahan yang dihadapi penduduk miskin dari segmen petani gurem bisa berakar dari asetnya yang justru terlalu kecil, atau dari persoalan alam dan

Profil Rumah Tangga Miskin

infrastruktur yang tidak mendukung, dan sebagainya. Akar permasalahan pedagang kecil, pengrajin kecil, buruh bangunan, pengangguran, buruh musiman, dan sebagainya bisa berbeda.

- Profil kemiskinan juga diharapkan dapat mendukung usaha-usaha menurunkan kemiskinan agregat melalui sasaran wilayah geografis.
- Pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demografi dan dimensi ekonomi penduduk miskin diharapkan mampu membantu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien.

Profil kemiskinan semestinya menyajikan informasi mengenai akar permasalahan yang dihadapi oleh berbagai segmen penduduk miskin dan sasaran geografis. Profil kemiskinan diharapkan mampu menjawab tentang apakah permasalahan lebih berakar pada orangnya, masalah infrastruktur/struktural atau masalah keterampilan, dan sebagainya. Informasi yang tersedia dalam Susenas tidak dapat mengungkapkan persoalan tersebut secara tuntas, karena lebih merupakan informasi tentang karakteristik rumah tangga miskin. Namun demikian, perbedaan karakteristik rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak

miskin dapat mengungkap beberapa catatan mengenai persoalan mendasar kemiskinan.

4.1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang diukur dari indikator rata-rata lama bersekolah kepala rumah tangga.

Tabel 4.1. Karakteristik Sosial Demografi Rumah tangga Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016

Karakteristik Rumah Tangga	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata ART	4,72	3,75	4,65
% Jenis Kelamin Kepala RT	92,61	7,39	100,00
Rata-rata Umur KRT (tahun)	43,65	52,34	44,29
Rata-rata Lama Sekolah KRT (tahun)	11,06	7,86	10,83

Sumber: Susenas Maret 2016

Profil Rumah Tangga Miskin

Penelitian tentang hubungan antara kemiskinan dan jumlah anggota rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Dengan jumlah anggota rumah tangga yang cenderung banyak maka akan berdampak pada rendahnya kemampuan rumah tangga tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangganya. Dengan demikian, jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Dari Tabel 4.1, terlihat secara rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin di Kepulauan Riau pada tahun 2016 adalah 4,65 orang. Artinya dalam satu rumah tangga secara umum terdiri dari 4-5 anggota rumah tangga. Selanjutnya, apabila dilihat dari distribusi persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga miskin pada tahun 2016 mencapai 7,39 persen, sedangkan laki-laki sebesar 92,61 persen. Persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga merupakan karakteristik yang cukup penting, mengingat secara umum akses perempuan yang telah/pernah menikah untuk mendapat pekerjaan, terutama sektor formal sangat terbatas. Di samping itu, adanya dua peran yang dijalankan oleh

kepala rumah tangga perempuan, yaitu mengurus rumah tangga dan bekerja, menyebabkan waktu yang digunakan untuk memperoleh pendapatan menjadi lebih terbatas.

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat apakah kepala rumah tangga miskin masih dalam kategori umur yang produktif. Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tercatat 44,29 tahun. Rata-rata umur kepala rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki menunjukkan angka sebesar 43,65 tahun, sedangkan rata-rata umur kepala rumah tangga perempuan adalah 52,34 tahun.

Hal menarik lainnya yang bisa diamati dari karakteristik demografi rumah tangga miskin adalah rata-rata lama sekolah. Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin adalah 10,83. Pada rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya adalah perempuan, rata-rata lama sekolahnya hanya mencapai 7,86. Artinya banyak dari kepala rumah tangga tersebut yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Banyak di antara mereka yang putus sekolah dan hanya menamatkan pendidikannya hanya pada jenjang Sekolah Dasar.

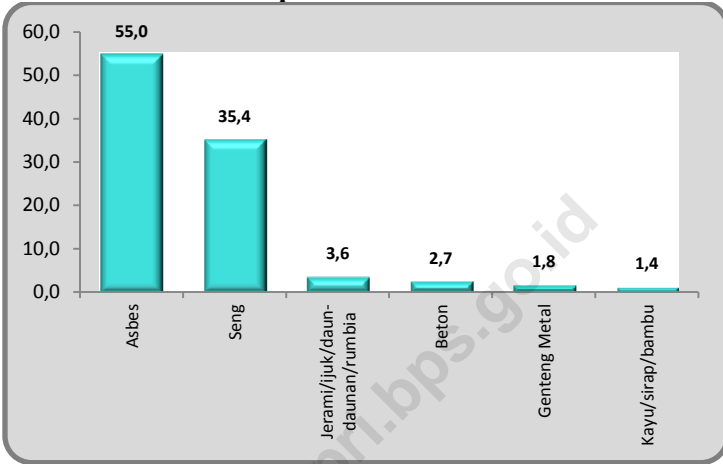
4.2 Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

Ada beberapa karakteristik yang menunjukkan apakah suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak. Selain karakteristik demografi, karakteristik tempat tinggal atau perumahan juga merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan rumah tangga miskin. Meskipun indikator tersebut tidak selalu sama di setiap daerah, namun mampu menjadi deteksi awal dari penentuan rumah tangga miskin.

4.2.1 Jenis Atap

Gambar 4.1 menyajikan profil rumah tangga miskin menurut jenis atap rumah terluas. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jenis atap seng dan atap asbes merupakan salah satu profil rumah tangga miskin mengingat persentase rumah tangga miskin yang menggunakan kedua jenis atap tersebut jauh lebih tinggi dibanding persentase jenis atap terluas yang lainnya. Persentase rumah tangga miskin yang memiliki rumah dengan atap asbes adalah yang terbesar, yaitu sebanyak 55,0 persen, sedangkan untuk atap seng sebanyak 35,4 persen.

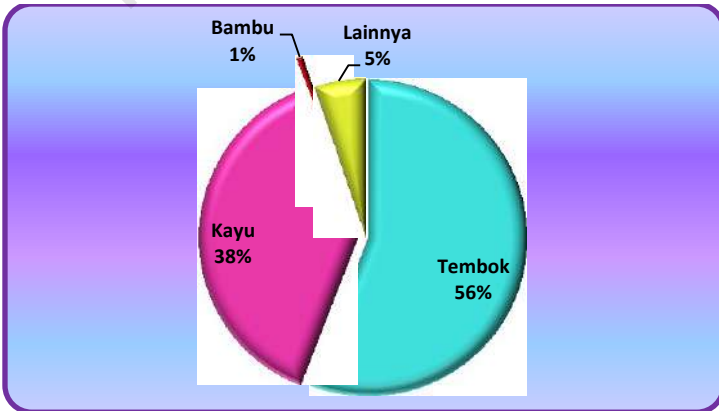
Gambar 4.1 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Atap Terluas Maret 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

4.2.2 Jenis Dinding

Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Dinding Terluas Maret 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

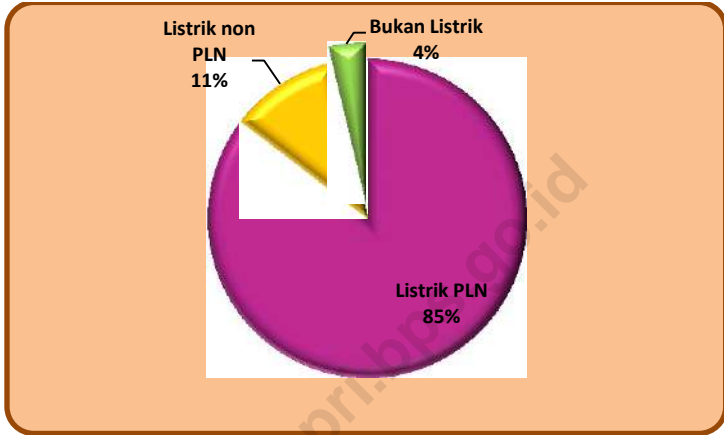
Profil Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan jenis dinding rumah, dari Gambar 4.2 terlihat bahwa sebagian besar, yaitu 56 persen rumah tangga miskin memiliki rumah yang berdinding tembok. Sedangkan 38 persen adalah rumah tangga miskin yang rumahnya berdinding kayu. Rumah berdinding kayu banyak dijumpai pada daerah tepi pantai atau laut.

4.2.3 Jenis Penerangan

Indikator perumahan lainnya adalah jenis penerangan rumah yang dibedakan atas listrik PLN, listrik Non PLN dan bukan listrik. Gambar 4.3 menyajikan rumah tangga miskin menurut ketiga jenis penerangan. 85 persen rumah tangga miskin sudah menggunakan listrik PLN untuk penerangan di rumahnya. Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik non PLN sebesar 11 persen dan masih ada 4 persen rumahtangga miskin yang menggunakan penerangan bukan listrik. Dari gambar terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Riau sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangannya, baik listrik PLN maupun listrik non PLN.

Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Miskin Kepulauan Riau menurut Sumber Penerangan, Maret 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

4.2.4 Sumber Air Minum

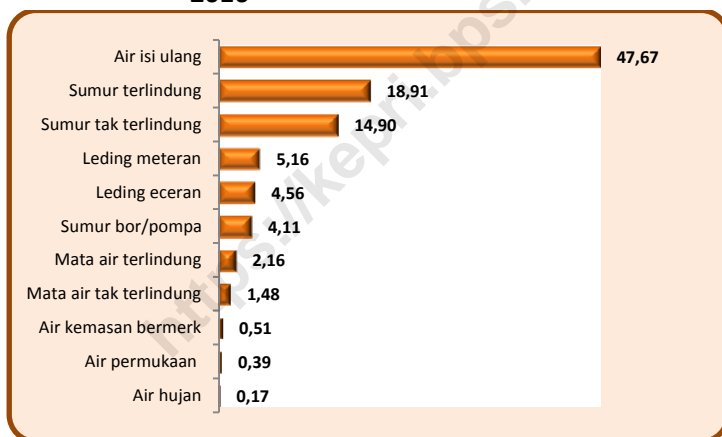
Ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga merupakan indikator perumahan yang juga dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Air bersih dalam uraian berikut didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan/ledeng/PAM/sumur terlindung/mata air terlindung. Ketidaktersediaan air bersih di rumah tangga adalah salah satu indikasi dari kemiskinan.

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan air bersih, tampak bahwa persentase rumah

Profil Rumah Tangga Miskin

tangga miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum tercatat sebesar 83,08 persen, sedangkan persentase rumah tangga miskin yang belum menikmati ketersediaan air bersih tercatat sebesar 17,02 persen.

Gambar 4.4. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Sumber Air Minum yang Digunakan, Maret 2016



Sumber: Susenas, Maret 2016

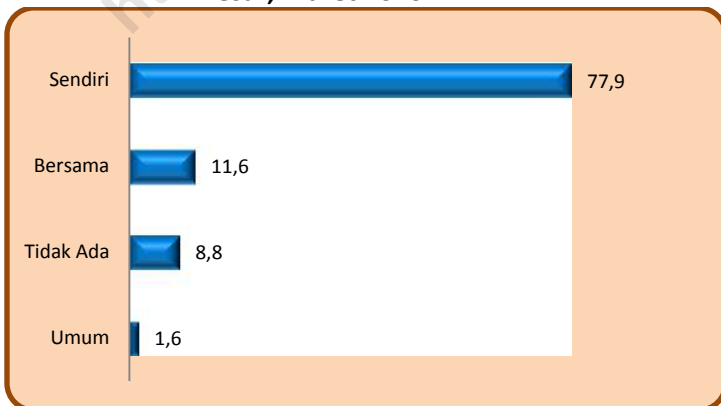
Menurut sumber air minum yang digunakan, rumah tangga miskin paling banyak menggunakan air yang berasal dari air isi ulang, yaitu sebesar 47,67 persen. Selanjutnya, sumber air minum yang paling banyak digunakan adalah sumur terlindung dan sumur tak terlindung, yaitu masing-masing sebesar 18,91 persen dan 14,90 persen. Hal ini

mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum pada rumah tangga miskin sudah cukup baik.

4.2.5 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Di samping ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting, di mana dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama, dan jamban umum/tidak ada.

Gambar 4.5. Rumah Tangga Miskin Kepulauan Riau menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, Maret 2016



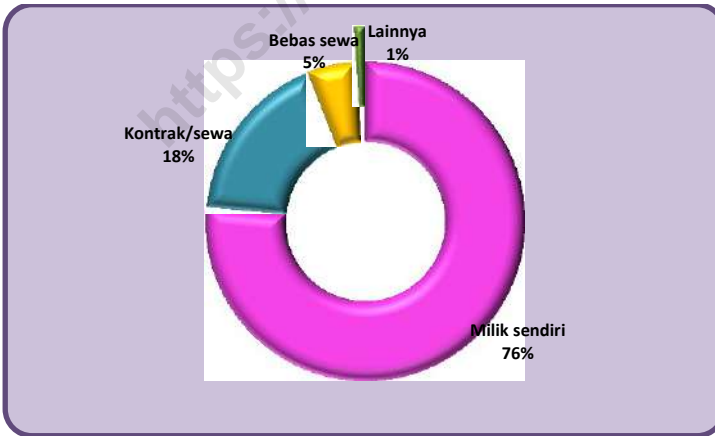
Sumber: Susenas 2016

Profil Rumah Tangga Miskin

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas buang air besar, tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri tercatat sebesar 77,90 persen dan yang menggunakan jamban bersama sebesar 11,6 persen. Yang perlu menjadi catatan adalah masih ada rumah tangga miskin yang tidak memiliki jamban, yaitu sebesar 8,8 persen.

4.2.6 Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal

Gambar 4.6. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Maret 2016



Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas 2016

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut status kepemilikan rumah, tampak bahwa persentase

rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri sebesar 76 persen dan yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 18 persen, sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan status kepemilikan bebas sewa sebesar 5 persen.

4.2.7 Luas Lantai

Salah satu indikator perumahan yang diinginkan banyak orang adalah keleluasaan pribadi (*privacy*) yang salah satunya dapat tercermin dari luas lantai rumah per kapita (m^2). Salah satu acuan dari Kementerian Kesehatan menentukan bahwa suatu rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika penguasaan luas lantai rumah per kapitanya minimal $8 m^2$ (BPS, 2001). Tabel 4.4. menyajikan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan luas lantai perkapita.

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut kategori luas lantai rumah per kapita yang disajikan pada Tabel 4.4., tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita kurang dari $9 m^2$ tercatat sebesar 38,3 persen. Sementara itu, yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita $9-16 m^2$ tercatat sebesar 44,4 persen, dan hanya sebesar 17,4

Profil Rumah Tangga Miskin

persen yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita lebih dari 16 m².

Tabel 4.2. Persentase Rumah Tangga Miskin Kepulauan Riau menurut Luas Lantai Per Kapita, Maret 2016

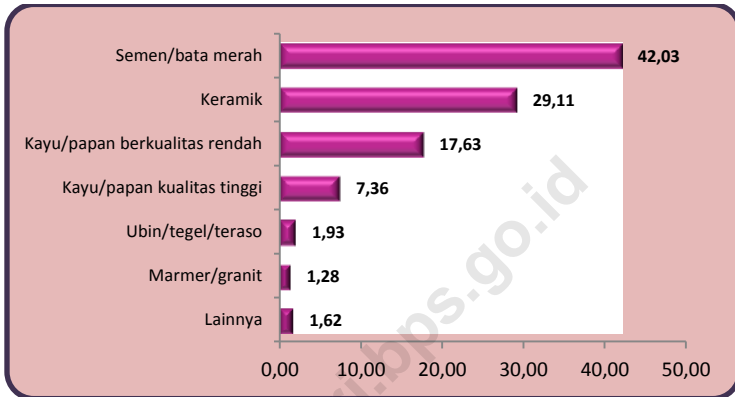
Luas Lantai Per Kapita (m ²)	Rumah Tangga Miskin (%)
(1)	(2)
< 9	38,3
9-16	44,4
> 16	17,4

Sumber: Susenas 2016.

4.2.8 Jenis Lantai

Gambar 4.7 menyajikan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan jenis lantai rumah. Rumah tangga miskin dengan jenis lantai terluas adalah semen/bata merah menempati urutan pertama, yaitu sebesar 42,03 persen, kemudian disusul dengan lantai keramik 29,11 persen.

Gambar 4.7 Persentase Rumah Tangga Miskin Kepulauan Riau menurut Jenis Lantai, Maret 2016



Sumber: Susenas 2016.

4.3 Karakteristik Sosial Ketenagakerjaan

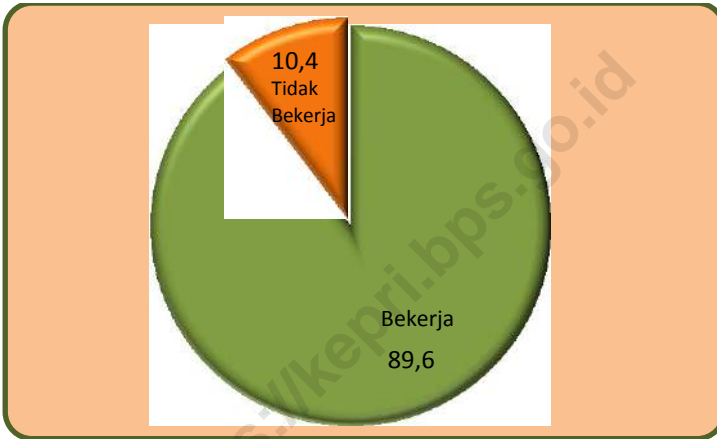
Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adalah status pekerjaan kepala rumah tangga.

Bekerja dalam konsep Badan Pusat Statistik adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut

Profil Rumah Tangga Miskin

termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Gambar 4.8. Persentase Miskin menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, Maret 2016



Sumber: Susenas 2016.

Gambar 4.8 memperlihatkan persentase kepala rumah tangga miskin yang bekerja sebanyak 89,6 persen. Sumber perekonomian rumah tangga yang ditopang oleh kepala rumah tangga akan sangat bergantung dengan pendapatan yang dihasilkan oleh kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan tidak selalu berarti rumah tangga tersebut akan lepas dari kemiskinan, jika pendapatan yang dihasilkan oleh kepala rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan,

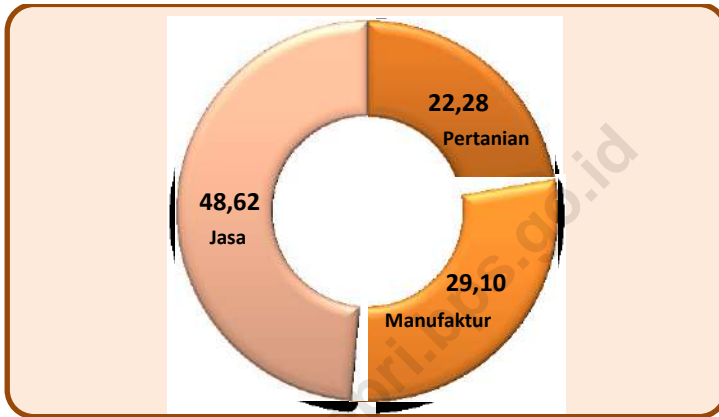
sandang dan papan, maka rumah tangga tersebut masih dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Distribusi rumah tangga miskin menurut lapangan usaha pekerjaan utama kepala rumah tangga disajikan pada Gambar 4.9. Pada dasarnya lapangan usaha dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok utama, yaitu sektor *Primer/Agriculture*, *Sekunder/Manufacture*, dan *Tersier/Service*. Sektor primer mencakup seluruh usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan) dan pertambangan dan penggalian, sedangkan sektor sekunder meliputi sektor industri, konstruksi, serta listrik, gas, dan air. Adapun sektor tersier terdiri atas sektor perdagangan, angkutan, keuangan, dan jasa-jasa.

Dari gambar 4.9, terlihat bahwa untuk kepala rumah tangga miskin yang bekerja, paling banyak terserap di sektor tersier/jasa yaitu sebesar 48,62 persen, disusul oleh sektor sekunder/manufacture 29,10 persen dan terakhir adalah sektor pertanian sebesar 22,28 persen.

Profil Rumah Tangga Miskin

Gambar 4.9. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2016



Sumber : BPS, Susenas 2016

Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian sebagian besar adalah rumah tangga miskin yang tinggal di perdesaan. Persentase kepala rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian di perdesaan sebesar 56,00 persen.

Rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian di perdesaan, pada umumnya masih mengandalkan pertanian tradisional. Mereka masih mengandalkan peralatan tradisional dan masih sangat bergantung pada cuaca. Akibatnya mereka tidak mampu

bekerja secara optimal dan tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk keluarga mereka.

Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga dan Tipe Daerah, Maret 2016

Lapangan Usaha	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian (Primer)	8,68	56,00	22,28
Manufaktur (sekunder)	38,42	5,97	29,10
Jasa (Tersier)	52,89	38,04	48,62
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas Maret 2016

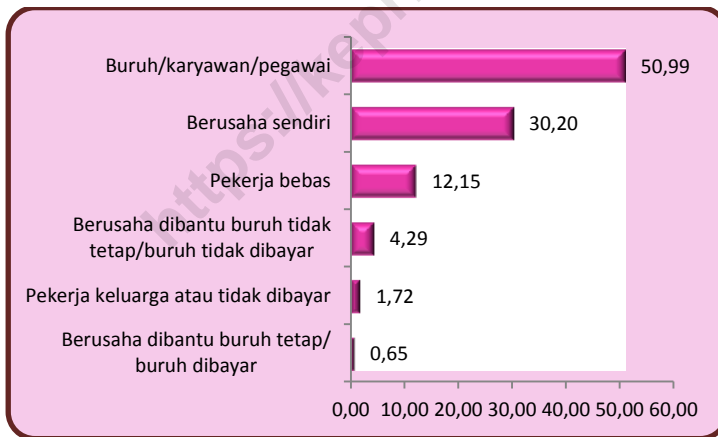
Berbeda dengan daerah perdesaan, rumah tangga miskin di perkotaan sebanyak 52,89 persen kepala rumah tangganya bekerja di sektor jasa, sedangkan manufaktur menempati urutan kedua yaitu sebesar 38,42 persen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harmadi (2007) kemiskinan di daerah perkotaan dapat muncul akibat adanya *spatial mismatch*. Ciri penting dari *spatial mismatch* adalah orang miskin di perkotaan pada umumnya

Profil Rumah Tangga Miskin

berpendidikan rendah, dimana sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja lebih banyak pada *high skilled labour*, sehingga orang-orang tersebut tidak dapat memperoleh pekerjaan seperti yang diharapkan.

Distribusi rumah tangga miskin menurut status pekerjaan utama kepala rumah tangga disajikan pada berikut.

Gambar 4.10. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status/Kedudukan dalam Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Maret 2016



Sumber: Susenas 2016

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa sebagian besar atau 50,99 persen rumah tangga miskin, kepala rumah tangganya berstatus buruh/karyawan/pegawai. Jika dilihat lebih dalam, rumah tangga miskin yang bekerja sebagai

buruh/karyawan/pegawai biasanya merupakan pekerja industri. Pekerja industri erat kaitannya dengan Upah Minimum. Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 sebesar Rp 2.178.710,- Garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau bulan Maret 2016 sebesar Rp 490.157,- perkapita per bulan, jika rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin adalah 4,65 maka rumah tangga disebut sebagai rumah tangga miskin jika memiliki pengeluaran kurang dari Rp 2.279.230,-. Apabila kita bandingkan dengan UMP Kepulauan Riau maka rumah tangga yang berstatus buruh dan hanya menerima upah sebesar UMP, maka rumah tangga tersebut berada di bawah garis kemiskinan.

4.4 Karakteristik Sosial Pendidikan

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Dalam berbagai penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan didapatkan hasil bahwa orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin. Secara tidak langsung, pendidikan yang tinggi akan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji/pendapatan yang layak. Oleh karena

Profil Rumah Tangga Miskin

itu pengentasan kemiskinan melalui pendidikan diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan.

Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah persentase kepala rumah tangga miskin menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kepala rumah tangga adalah seseorang yang bertanggung jawab secara ekonomi terhadap anggota rumah tangganya, sehingga pendidikan kepala rumah tangga akan berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian rumah tangganya.

Tabel 4.4. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, Maret 2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Kepala Rumah Tangga		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah	16,7	30,6	17,8
SD	37,4	43,1	37,9
SLTP	10,5	16,6	10,9
SLTA	34,7	4,3	32,4
Perguruan Tinggi	0,6	5,4	1,0
Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: Susenas, Maret 2016

Berdasarkan Tabel 4.6, secara umum dapat dilihat bahwa pada rumah tangga miskin tingkat pendidikan kepala

rumah tangga laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga miskin perempuan. Bahkan jika dilihat persentase kepala rumah tangga miskin yang berjenis kelamin perempuan yang tidak tamat SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu 30,6 persen dibanding 16,7 persen. Pada rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga laki-laki, ada sebanyak 45,8 persen kepala rumah tangga yang menamatkan pendidikan dasar 9 tahun.

Tabel 4.5. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga dan Tipe Daerah, Maret 2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tipe Daerah		Total
	Kota	Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah	14,2	29,8	17,8
SD	32,1	57,1	37,9
SMP	11,9	7,6	10,9
SMA	40,4	5,4	32,4
Perguruan Tinggi	1,3	0,0	1,0
Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: Susenas, 2016

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sekitar 37,9 persen kepala rumah tangga miskin menamatkan

Profil Rumah Tangga Miskin

pendidikannya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD), dan jika dilihat berdasarkan tipologi daerahnya maka di daerah perdesaan sebagian besar kepala rumah tangga miskin adalah lulusan SD. Yang menarik, ternyata ada sebanyak 32,4 persen rumah tangga miskin yang lulus SLTA, dan 40,4 persen rumah tangga miskin tersebut berada di daerah perkotaan. Jika dikaitkan dengan lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan maka hal tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan di daerah perkotaan cukup tinggi. Lulusan SLTA tidak mampu bersaing untuk sektor-sektor modern, karena mereka dianggap kurang memiliki ketrampilan yang cukup untuk mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia.

Sebaliknya di daerah perdesaan, sebanyak 86,9 persen rumah tangga miskin kepala rumah tangganya tidak menamatkan pendidikan dasar sembilan tahun. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal ini mengindikasikan akses pendidikan di daerah perdesaan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sangat terbatas terutama untuk rumah tangga miskin.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. A. Yani No. 21 Tanjungpinang 29124

Telp.: (0771) 4500155

website: kepri.bps.go.id e-mail: bps2100@bps.go.id

ISSN: 2442-6261



9 772442 626001